



# PERUBAHAN RENJA TAHUN 2022

**PETUGAS DISUKCABIL SERAHKAN SAPU KUWAT KE RUMAH SAKIT**  
• @dispendukcapilsurakarta  
• @Dispenduk\_solo  
• Inovasi Dukcapil Surakarta  
• Disadmindukcapil Kota Surakarta  
• www.dispendukcapilsurakarta.go.id

**JEMPUT BOLA REKAM KTP EL**  
KAMI SIAP MELAYANI PEREKAMAN KTP EL BAGI LANSIA / DIFABEL KE RUMAH

**PELAYANAN CEPAT DAN MEMUASKAN...  
DISUKCABIL SOLO TOP**

**BENING KEKASIHKU**  
PEMBERIAN KARTU KELUARGA DAN KTP - EL SETELAH PERISTIWA PERNIKAHAN

**BESUK KIAMAT**  
PENGIRIMAN AKTA KEMATIAN, BESERTA PERUBAHAN STATUS CERAI MATI PADA KK DAN KTP SUAMI / ISTRI

**BENING KEKASIHKU**  
PEMBERIAN KARTU KELUARGA DAN KTP - EL SETELAH PERISTIWA PERNIKAHAN

**LANTATUR**  
LAYANAN TANPA TURUN PEMBUATAN KTP. KIA CEPAT DAN MUDAH

**DISUKCABIL BUKA LAYANAN DI CAR FREE DAY**

**SISWA SMKN 3 DAN MAN 2 SURAKARTA IKUTI REKAM KTP-EL**  
KAMI SIAP MELAYANI PEREKAMAN KTP EL BAGI LANSIA / DIFABEL KE RUMAH

MELAYANI SEPENUH HATI  
MELAHIRKAN PRESTASI

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik. Perubahan Rencana Kerja Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini mengacu kepada RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2021-2026 beserta Perubahannya.

Renja Perubahan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 ini disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Dokumen ini memuat hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 disertai dengan Rencana Kerja Perubahan beserta kerangka perubahan pendanaannya.

Renja Perubahan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 ini diharapkan dapat terlaksana secara utuh meliputi komponen sumber daya manusia, pendanaan maupun komponen terkait lainnya serta mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait, sehingga dapat meminimalkan dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan. Akhir kata, apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renja Perubahan ini.

Surakarta,  
Kepala Dinas Administrasi Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil  
Kota Surakarta

**YUHANES PRAMONO, SH., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP: 196404131989031010



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Jenderal Sudirman No.2. Telp.(0271)639554;Fax.(0271)644808  
Website:<http://dispendukcapil.surakarta.go.id> email: [dispendukcapil@surakarta.go.id](mailto:dispendukcapil@surakarta.go.id)  
SURAKARTA 57111

---

**SURAT PERNYATAAN  
PERUBAHAN RENJA DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : YUHANES PRAMONO,SH.,M.Si

Jabatan: Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
berkomitmen akan mewujudkan target kinerja yang ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2022 ini, dalam rangka mencapai target kinerja Renstra Dinas Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2021–2026.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab seluruh pejabat struktural di lingkungan perangkat daerah kami sesuai dengan eselon sebagaimana tercantum dalam cascading Dinas ini.

Surakarta,  
KEPALA DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA SURAKARTA

YUHANES PRAMONO,SH.,M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP. 19640413 198903 1 010

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum .....	I-6
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-12
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-12
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II .....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Capaian Kinerja Fisik dan Realisasi Anggaran Triwulan II .....	II-1
2.2. Analisis Kerja Pelayanan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	II-2
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta..	II-2
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>	<b>III-1</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>IV-1</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia mengalami perubahan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan kedua peraturan perundangan tersebut, pemerintah daerah diberikan kesempatan yang luas dalam merencanakan pembangunan di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Perangkat Daerah (PD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah, dan Rencana Kerja (Renja) PD sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD.

Penyusunan dokumen Renja Perubahan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah. Amanah dalam Peraturan tersebut mengarahkan Renja Perubahan PD agar mengacu pada dokumen perencanaan daerah, dokumen perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah. Ketentuan ini bermakna bahwa melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diupayakan adanya sinergitas dan keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang, menengah dan tahunan.

Terkait dengan peraturan tersebut, tugas dan fungsi Dinas Admindukcapil Kota Surakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja organisasi Dinas Daerah termasuk Dinas Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil sesuai dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi, serta Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di antaranya mengatur tentang kodefikasi nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator dan satuannya. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
3. Pengelolaan administrasi kependudukan;
4. Pencatatan dan penerbitan akta-akta kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
6. Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
7. Penyelenggaraan sosialisasi; dan
8. Pembinaan jabatan fungsional.

Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah melaksanakan Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 sehingga perlu untuk diikuti dengan penyusunan Perubahan renja tahun berjalan atau Tahun 2022, sebagaimana telah disusun Perencanaan Kinerjanya. Dalam perkembangannya sampai dengan semester 2, terdapat perubahan yang perlu dilakukan, mengingat terdapat Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) khususnya untuk anggaran yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus Tahun 2021 yang harus digunakan di tahun berjalan yaitu Tahun 2022, berdasarkan surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 906/3553/Dukcapil tanggal 7 Februari 2022 Hal Penganggaran Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Tahun 2022. pada angka 3 disebutkan bahwa; sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor:

119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik mengatur bahwa:

1. ayat (1) sisa DAK Nonfisik yang terdapat di RKUD sampai dengan akhir tahun wajib dianggarkan kembali oleh pemerintah daerah dalam APBD/perubahan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. ayat (6) dalam hal jenis DAK Nonfisik tidak dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya, pemerintah daerah dapat menggunakan sisa DAK Nonfisik sesuai dengan petunjuk teknis paling akhir yang diterbitkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.

Selain penggunaan SiLPA DAK Tahun 2021, terdapat kebutuhan yang mendesak terkait penyimpanan arsip Pencatatan Sipil yang belum diakomodir dalam APBD sejak Tahun 2020. Kebutuhan lemari penyimpanan arsip ini pernah dianggarkan pada tahun 2020, akan tetapi kebijakan *refocussing* membuat Dinas harus menunda kegiatan tersebut sampai dengan penyusunan renja tahun 2022. Kebutuhan penyimpanan arsip ini cukup mendesak mengingat keadaan saat ini banyak berkas arsip tersebut harus ditata dilantai *basement* tempat penyimpanan arsip, sehingga rawan terhadap kerusakan arsip karena kondisi lembab dan rawan rusak jika terjadi banjir atau keadaan *force majeure* lainnya. Sehingga prioritas perubahan renja tahun 2022 adalah pengamanan dan penyimpanan arsip Pencatatan Sipil demi mendukung tercapainya target kinerja Program Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan.

Beberapa kondisi tersebut mendasari penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022 Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Perubahan yang dilakukan menggunakan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Renja Perubahan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
  19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

21. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan

- Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  36. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005–2025;
  37. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan;
  38. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 1);
  39. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran

- Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 117);
40. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);
  41. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan data Kependudukan Berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk Perencanaan Pembangunan di Kota Surakarta;
  42. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Bela Sungkawa Kirim Akta Kematian;
  43. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kartu Identitas Anak;
  44. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2019 tentang Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi;
  45. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2019 tentang Review Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016-2021;
  46. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
  47. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Inovasi Lantatur Pelayanan Administrasi Kependudukan; dan
  48. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang Berkah Nikah Mengganti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk elektronik Sesuai Impian dan Harapanku.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022 Disadmindukcapil Kota Surakarta adalah:

1. Maksud Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:
  - a. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022

- b. Keterpaduan program Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih.
  - c. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2022.
  - d. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.
2. Tujuan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022 Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta adalah :
- a. Untuk sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tahun 2022 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJM Daerah Kota Surakarta tahun 2021-2026.
  - b. Untuk mengevaluasi program dan kegiatan pada Renja 2022, dalam periode perencanaan jangka menengah;
  - c. Mendukung koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dalam melaksanakan tupoksinya;
  - d. Menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas arah kerja Dinas;
  - e. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kerja di Dinas Admindukcapil Kota Surakarta terutama dalam pelaksanaan inovasi layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Surakarta; dan
  - f. Menjamin penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

- 2.1. Capaian Target Kinerja Fisik dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2022
- 2.2. Analisis Kerja Pelayanan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

**BAB III: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**BAB IV: PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022**

#### **SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

#### **2.1 Capaian Target Kinerja Fisik dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2022**

Hasil evaluasi kinerja Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan triwulan II untuk capaian kinerja fisik dan anggaran bahwa beberapa target capaian sampai dengan triwulan II belum dapat direalisasikan. Hal ini terjadi karena pemberlakuan Aplikasi Simda Next-G berbasis Web atau lebih dikenal dengan *Financial Management Information System (FMIS)* yang merupakan hasil pengembangan aplikasi SIMDA oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dalam pengimplementasiannya, Dinas mengalami beberapa kendala, antara lain bahwa FMIS belum mengakomodir beberapa sub kegiatan yang ada dalam Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, antara lain:

- Bidang PIAK PD terkendala pada 6 sub kegiatan yang tidak ada di FMIS sehingga tidak dapat dilakukan proses SPJ
- Rekening fotocopy dan penggandaan pada bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang PIAK PD dan Sekretariat terkumpul menjadi satu rekening di Bidang Pencatatan Sipil sehingga terkendala dalam proses SPJ

Secara umum, FMIS masih perlu dilakukan perbaikan sistem agar dapat menunjang kegiatan Dinas. Beberapa kekurangan tersebut antara lain:

1. Menu SKPD - Bendahara Pengeluaran Khususnya Pajak belum dilakukan update terhadap fitur Pajak sehingga Bendahara Pengeluaran kesulitan dalam melakukan proses Input atas data pajak yang telah disetor
2. Jumlah Karakter Alfabeth pada menu Entry Bendahara Pengeluaran - Bukti GU / Bukti TU pada menu entry Bukti GU jumlah karakter pada Tool Uraian masih terbatas sehingga beberapa bukti yang mempunyai uraian cukup panjang tidak dapat di entry seluruhnya, hal ini membuat Bendahara Pengeluaran menyiasati dengan memberikan kode nomor kwitansi pada Uraian entry Bukti GU.
3. Adanya pendobelan secara otomatis pada beberapa fitur entry data yaitu Realisasi Pencairan SP2D dan Ketetapan Pendapatan. Masalah tersebut baru diketahui ketika muncul laporan dari petugas input Kasda dan Operator Bendahara Penerimaan sehingga untuk sementara waktu diputuskan bahwa proses input Realisasi Pencairan SP2D dan Ketetapan Pendapatan ditangguhkan sampai dengan muncul perbaikan/update.

Adapun realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan II atau semester 1 Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut:







**REALISASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II / SEMESTER I TAHUN 2022**

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	ANGGARAN TOTAL	EVALUASI s/d TRIWULAN II			
				TARGET KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
				FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Nilai SAKIP	<b>9.127.547.660</b>	76	<b>4.059.105.000</b>	n/a	<b>4.111.245.744</b>
		Nilai SKM		91,58		93,31	
		Nilai Maturitas Kelembagaan		40,5		n/a	
		Nilai Maturitas SPIP		2.800		n/a	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti penyelenggaraan Musrenbang DKT	145.228.500	50	15.970.000	45	17.049.900
		Jumlah dokumen penetapan RKPD		2		2	
		Jumlah Dokumen Revisi Renstra Perangkat Daerah		1		1	
		Jumlah PK dan RKT yang tersusun		2		2	
		Jumlah dokumen RTP dan SPIP yang tersusun		1		1	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun	4.475.000	38	1.655.000	38	1.675.000

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun	3.550.000	19	639.000	19	640.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	8.897.500	9	711.000	9	800.000
		Jumlah dokumen LKPJ tersusun		0		0	
		Jumlah dokumen LPPD tersusun		1		1	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0		0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SOP	121.807.800	19	21.925.000	19	22.415.900
		Jumlah dokumen SPP		1		1	
		Jumlah dokumen SKM		1		1	
		Jumlah dokumen Surveillance ISO 19001-2015		1		0	
	<b>Administrasi Keuangan Daerah</b>	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan bagi ASN	4.724.707.671	40	1.964.211.000	40	2.004.938.648
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen CALK	5.237.955	12	576.000	12	621.500
		Jumlah Dokumen LRA		1		0	
		Jumlah Dokumen neraca		1		0	
		Jumlah dokumen RKA		2		1	

	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang terlaksana					
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	75.000.000	10	7.500.000	10	7.474.300
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5.600.000	10	0	10	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	238.578.540	1	0	1	0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1.800.000	0	0	0	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum rapat yang disediakan	62.700.966	48	29.469.000	48	29.653.500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1.597.530.050	76	1.198.147.000	76	1.200.643.800
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2.000.000	1	0	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah belanja perjalanan dinas yang tercukupi	140.000.000	37	50.400.000	37	51.055.404

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu					
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.500.000	1	0	0	0
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	6.000.000	24	1.380.000	24	1.423.600
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	28	1.620.000	28	1.624.120
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.250.000	49	5.400.000	49	5.469.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.692.488.678	44	727.770.000	44	733.667.800
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara	180.050.000	15	25.207.000	15	25.410.172
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	7.500.000	12	0	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	63.145.000	3	0	3	0

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara	22.500.000	30	6.525.000	30	6.683.100
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENDUDUK</b>	<b>PENDAFTARAN</b>					
		Cakupan Kepemilikan KTP elektronik		99,99		99,88	
		Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	<b>988.153.925</b>	100	<b>237.137.075</b>	100	<b>156.032.400</b>
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		92		96,24	
	<b>Pelayanan Penduduk</b>	<b>Pendaftaran</b>					
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan KK, KTP elektronik, KIA					
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah penduduk non permanen dan rentan administrasi yang didata	8.983.025	31	2.695.000	31	2.700.000
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah KTP -el yang dicetak	9.010.000	27.700	3.965.000	23.930	4.050.000
		jumlah KK yang dicetak		51.000		23.044	
		jumlah KIA yang dicetak		37.000		7.579	
	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta rapat koordinasi penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	9.000.000	15	180.000	15	225.000
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Implementasi Inovasi Pelayanan (pelayanan jemput bola)	568.450.000	14	73.898.500	14	74.789.900
		Inovasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk					
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	jumlah penduduk pindah keluar	4.477.500	14	582.075	14	0
		Jumlah penduduk datang					

		Biodata Penduduk yang diterbitkan					
	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah laporan penerbitan peristiwa kependudukan	4.460.000	12	0	12	0
	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah laporan pindah datang penduduk	4.460.000	12	0	12	0
		Jumlah dokumen yang diterbitkan atas pelaporan jiwa cecer					
	<b>Penataan Penduduk</b>						
	<b>Pendaftaran Penduduk</b>	Persentase penataan pendaftaran penduduk yang terpenuhi					
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen Rencana kerja, monev dan RTL terkait Pendaftaran penduduk	8.750.000	8	612.500	8	700.000
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah kebutuhan blangko selain Blangko KTP-El, Formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk	85.217.500	98	82.660.000	98	0
	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>						
	<b>Pendaftaran Penduduk</b>	Persentase permohonan pendaftaran penduduk yang dilayani					
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	jumlah peserta rapat koordinasi terkait penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk	6.300.000	5	0	5	0
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Jemput bola Pendaftaran penduduk	90.000.000	10	8.100.000	10	8.725.000

	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Fasilitasi permohonan penghapusan NIK ganda dan surat pindah dari luar kota	4.497.500	5	0	5	0
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta sosialisasi pendaftaran penduduk	45.207.500	5	0	5	0
	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kerjasama yang dilakukan terkait Pendaftaran penduduk	13.479.000	5	0	5	0
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah leaflet / brosur terkait pendaftaran penduduk yang disusun	27.750.000	3	0	3	0
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah data kependudukan terkait pendaftaran penduduk yang disajikan	4.448.000	8	0	8	0
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	jumlah Monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan Pencatatan Sipil					
	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pengadministrasian blanko dokumen pendaftaran penduduk yang disusun	2.700.000	18	0	18	0
		Berita Acara pemusnahan dokumen pendaftaran penduduk					
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	jumlah petugas terkait pendafatran penduduk dilakukan pembinaan dan pengawasan	22.406.400	2	0	2	0



	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan SDM pendaftaran penduduk	68.557.500	95	64.444.000	95	64.842.500
	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Persentase kepemilikan akta kelahiran	<b>1.071.229.922</b>	100	<b>196.110.250</b>	99,8	<b>204.425.000</b>
		Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.		99,8		99,8	
		Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.		99,8		99,8	
		Persentase Penerbitan Akta Kematian		100		100	
		Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan		100		100	
		Cakupan Penerbitan Akta Cerai		100		100	
		Cakupan Pengakuan dan Pengesahan Anak		100		100	
	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil					
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah penerbitan akte kelahiran	469.703.722	25	112.730.000	25	116.775.000
		Jumlah penerbitan akte kematian					
		Jumlah penerbitan akte nikah					
		Jumlah penerbitan akte cerai					

		Jumlah penerbitan pengakuan dan pengesahan anak					
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	jumlah implementasi inovasi pelayanan	476.760.650	17	76.282.000	17	80.400.000
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Dokumen rencana kerja, monev dan RTL penyelenggaraan adminduk terkait Pencatatan Sipil	888.000	8	0	8	0
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Jenis Formulir terkait Pencatatan sipil yang disediakan	8.500.000	5	0	5	0
	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	Persentase permohonan akta pencatatan sipil yang dilayani					
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kotadalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	jumlah peserta rapat koordinasi yang dilakukan dalam rangka penertiban pelayanan pencatatan sipil	6.300.000	7	0	7	0
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah implementasi pelayanan jemput bola terkait pencatatan sipil	8.988.800	16	1.350.000	16	1.400.000
	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Pendampingan pelayanan pencatatan sipil untuk penduduk rentan	8.987.500	7	539.250	7	600.000
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah instansi yang memanfaatkan data Akta kelahiran dan Akta kematian	4.490.000	59	2.605.000	59	2.625.000
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peserta sosialisasi terkait pencatatan sipil	3.577.500	9	0	9	0

	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan Tinggi terkait Pencatatan sipil yang dilakukan	4.490.000	59	2.604.000	59	2.625.000
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Pembuatan leaflet/brosur terkait pencatatan sipil	7.650.000	15	0	15	0
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	jumlah Monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan Pencatatan Sipil					
	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan pengadministrasian blanko dokumen pelayanan pencatatan sipil	2.550.000	18	0	18	0
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	jumlah mitra kerja pelayanan pencatatan sipil yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	31.500.000	21	0	21	0
	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peserta koordinasi dan supervisi dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	9.450.000	1	0	1	0
	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan SDM bidang pencatatan sipil	27.393.750	9	0	9	0

	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Persentase ketersediaan data bidang kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai standar kebutuhan layanan data	<b>618.363.373</b>	100		<b>20.697.400</b>		<b>21.200.000</b>
		Persentase OPD yang telah pemanfaatan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama		70,59				
	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database</b>	Jumlah ketersediaan database kependudukan yang valid dan update						
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah pengolahan dan penyajian data kependudukan (DKB)	159.306.863	9	0		9	0
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	jumlah perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan	34.248.975	9	0		9	0
	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	jumlah data yang telah diinventarisasi untuk kepentingan pembangunan daerah	35.885.500	9	0		9	0
	<b>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Jumlah standar pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang tersedia						
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi	jumlah dokumen Rencana Kerja, RTL dan Monev pengelolaan informasi administrasi kependudukan	26.322.500	33	8.423.200		33	8.550.000

	<b>Penyelenggaraan Informasi Kependudukan</b> <b>Pengelolaan Administrasi</b>	jumlah penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan					
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kotadalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	jumlah koordinasi penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan antar lembaga Pemerintah dan non Pemerintah	18.000.000	7	0	7	0
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah sarana prasarana dalam Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disediakan	127.500.000	7	0	7	0
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah yang mendapatkan fasilitasi hak akses pemanfaatan data kependudukan	27.019.500	25	6.485.000	25	6.590.000
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah media sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	22.815.035	1	2.278.000	1	2.175.000
	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah database kependudukan yang terupdate yang diolah dan disajikan	43.890.000	9	3.511.200	9	3.885.000
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	jumlah Peserta rapat pembinaan dalam rangka pengelolaan informasi administrasi kependudukan					

	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	jumlah petugas pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	25.875.000	9	0	9	0
	Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	jumlah koordinasi dan supervisi data laporan peristiwa dari Kementerian Agama (KUA Kecamatan) dan Pengadilan Agama	30.000.000	9	0	9	0
	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah peserta bimbingan teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	67.500.000	9	0	9	0
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Persentase tersedianya profile kependudukan sesuai peraturan perundangan	<b>56.300.000</b>	100	-	-	-
	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	jumlah dokumen profil kependudukan per semester					
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil kependudukan per semester yang cetak	9.200.000	9	0	9	0
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil kependudukan per semester yang cetak yang disusun	47.100.000	9	0	9	0
<b>NILAI TOTAL</b>			<b>12.378.322.519</b>		<b>4.525.994.725</b>		<b>4.485.428.844</b>



## 2.2 Analisis Kerja Pelayanan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Isu tentang *Good Governance* menjadi tema yang penting dalam perkembangan Administrasi Publik di Indonesia. Hal ini mendorong pemerintah melakukan reformasi disegala bidang terutama pada tataran pemerintahan baik pada level birokrasi maupun legislatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah mencakup pelayanan masyarakat dan pelayanan administrasi. Kedua hal tersebut beriringan dalam mewujudkan kinerja pelayanan yang baik (*good performance*) dalam pemerintahan. Tujuan pelayanan publik didukung dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks otonomi daerah diharapkan untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat terutama dalam penyediaan fasilitas publik dan administrasi publik.

Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang sesuai antara hasil dan harapan. Semua orang akan mengatakan bahwa pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang efektif dan efisien. Timbul permasalahan dalam pelayanan yang di sebabkan oleh individu atau pelaku pelayanan dan yang dilayani seperti ketidak jelasan komunikasi. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan dalam pelayanan untuk menyejahterakan masyarakat

Pelayanan yang baik sangat didambakan oleh semua penyelenggara administrasi atau administrator karena pekerjaan yang membutuhkan ketepatan waktu, kejelasan kerja, keterbukaan dan kesederhanaan agar mereka yang dilayani menjadi puas.

Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang prima senantiasa melakukan berbagai terobosan inovasi dalam pelayanan. Tahun 2022, prioritas layanan pengurusan dokumen administrasi kependudukan adalah layanan online, mengurangi layanan tatap muka. Akan tetapi terjadi penyesuaian sejak pemberlakuan Sistem Informasi Adminduk (SIAM) secara terpusat sebagai kebijakan dari Ditjendukcapil Kementerian Dalam Negeri RI dimana SIAM Terpusat yang merupakan sistem digitalisasi yang digunakan agar pelayanan Dukcapil dapat terkoneksi daring secara nasional. Sistem terpusat ini lebih efisien dari segi sistem keamanan siber. Akan tetapi dari sisi layanan di Daerah, dalam hal olah data *by name by address* harus menunggu koordinasi dengan Ditjendukcapil sehingga membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya. Dalam rangka melaksanakan sinkronisasi kebijakan tersebut, maka dilakukan perubahan layanan dengan penekanan pada sistem jemput bola layanan serta



konsistensi pelaksanaan inovasi pengurusan dokumen adminduk. Hal ini dilakukan untuk strategi percepatan penuntasan target kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Kegiatan jemput bola layanan yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II tahun 2022 adalah kegiatan jemput bola KIA di 5 Kecamatan, jemput bola akta kelahiran di 54 Kelurahan dan Perekaman KTP el di sekolah-sekolah. Kegiatan ini cukup efektif dilaksanakan terbukti dengan capaian KIA 97,45% dan perekaman wajib KTP el dari target 98,68% tercapai 98,73%. Selain itu, terdapat inovasi layanan terbaru bernama LANTATUR (Layanan Tanpa Turun) dengan konsep pelayanan *drive thru* cetak KTP el dan KIA didasari semangat memudahkan pelayanan karena masyarakat cukup mendaftar online kemudian dapat mengambil dokumen KTP el atau KIA di Kecamatan setempat tanpa harus turun dari kendaraan. Penjadwalan LANTATUR secara bergiliran di 5 Kecamatan setiap 1 minggu sekali. Layanan ini cukup digemari masyarakat terbukti dari animo Pemohon yang mendaftar layanan LANTATUR. Inovasi Lantatur dengan konsep *drive thru* ini diluncurkan dalam upaya menjawab keinginan masyarakat yang menuntut layanan yang mudah, cepat dan tidak perlu turun dari kendaraan sepeda atau mobil. Layanan inovasi Lantatur, dikhususkan untuk pelayanan KTP-el dan KIA. Pilihan dua produk pelayanan ini karena penduduk belum bisa mencetak secara mandiri. Sementara untuk produk layanan yang lain seperti KK dan Akta Pencatatan Sipil sesuai ketentuan Permendagri yang baru, penduduk telah bisa mencetak secara mandiri dengan kertas HVS A4 80 gram.

Sementara untuk mekanisme dan tata cara permohonan inovasi Lantatur sangat sederhana yakni; pemohon dapat mendaftar melalui WA, mengunggah persyaratan dan data dukung, kemudian jika persyaratan lengkap maka akan mendapat notifikasi untuk pengambilan dokumen di Kecamatan setempat tanpa harus turun dari kendaraannya.

### **2.3 Isu-isu Penting Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta**

Pada bulan April 2022 terdapat pemberlakuan sistem informasi administrasi kependudukan terpusat (SIAK TERPUSAT) dari Ditjendukcapil. Implementasi SIAK Terpusat ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan menjadikan setiap kegiatan pelayanan dokumen kependudukan lebih secure (aman), cepat, terorganisir dan meminimalisir calo. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan database pada sistem sebelumnya yakni SIAK Terdistribusi dilakukan dengan pengelolaan database di daerah sehingga masih terdapat *margin of error* atau perlu dikonsolidasikan ke sistem pusat terlebih dahulu sehingga bisa ditemukan

kesalahan pada data kependudukan seperti data ganda, data tidak ditemukan dalam layanan publik dan ada kemungkinan peretasan data dari luar (*outside hacking*). SIAK Terpusat membuat pelayanan adminduk di berbagai daerah, termasuk dalam dan luar negeri dapat diintegrasikan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengurus dokumen Adminduk dimanapun dan kapanpun secara online dan tidak online. Datanya pun tersimpan rapi dalam jaringan, *easy to carry* dan dapat dibuka kapanpun dimanapun.

Terlepas dari semua kemudahan dan keamanan oleh sistem tersebut, pemberlakuannya berdampak pada menurunnya indeks kepuasan masyarakat di Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Penilaian Masyarakat terhadap Tingkat Kinerja/Kepuasan pada Atribut SKM didapatkan ada 2 unsur yang memiliki nilai dibawah unsur yang lain yaitu Kesesuaian Persyaratan dan Ketepatan Waktu Pelayanan. Berdasar perhitungan skor SKM yang diperoleh adalah sebesar 91,09. Nilai tersebut berada pada rentang skala 88,31-100,00 sehingga skor SKM Triwulan II termasuk pada kategori A. Dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan masyarakat menilai Sangat Baik atau merasa Sangat Puas terhadap kinerja pelayanan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Berdasarkan evaluasi Inovasi pelayanan yang telah dilakukan, masyarakat sangat mengapresiasi inovasi pelayanan yang dilakukan. Terbukti dari respon yang antusias dari masyarakat terhadap semua inovasi tersebut. Akan tetapi indeks tersebut mengalami penurunan dari triwulan I sebesar 91,61 atau turun sebesar 0,52 poin. Keluhan yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat adalah karena perubahan beberapa persyaratan yang disebabkan oleh adanya perubahan mekanisme pelayanan dari Dukcapil Dalam Genggaman ke WA Tiket (SIAK Terpusat). Karena dengan pemberlakuan SIAK Terpusat, maka aplikasi android Dukcapil Dalam Genggaman berhenti beroperasi. Penggunaan metode WA Tiket dengan aplikasi SIAK terpusat yang baru saja berjalan menyebabkan pelayanan agak terhambat karena prosesnya belum murni *online*. Meskipun IKM pada tahun 2022 triwulan 2 secara indeks turun dari capaian IKM triwulan 1, akan tetapi kualitas pelayanan publik Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta masuk dalam kategori pelayanan "SANGAT BAIK"

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan**

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Program Pendaftaran Penduduk**

- a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - 1) Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
  - 2) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
  - 3) Sub Kegiatan Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk
  - 4) Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - 5) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
  - 6) Sub Kegiatan Pencatatan atas pelaporan peristiwa Kependudukan
  - 7) Sub Kegiatan Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan
- b. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk
  - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk
  - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan buku terkait Pendaftaran penduduk sesuai kebutuhan
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
  - 1) Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - 2) Sub Kegiatan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
  - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
  - 4) Sub Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
  - 5) Sub Kegiatan Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk
  - 6) Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan masyarakat terkait Pendaftaran penduduk
  - 7) Sub Kegiatan Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pendaftaran penduduk

- d. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
  - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - 2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk
  - 3) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk

## **2. Program Pencatatan Sipil**

- a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
  - 1) Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
  - 2) Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
  - 3) Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil
  - 4) Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-El, Formulir, dan buku terkait Pencatatan Sipil sesuai kebutuhan
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
  - 1) Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
  - 2) Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil
  - 3) Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
  - 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan sipil
  - 5) Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
  - 6) Sub Kegiatan Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil
  - 7) Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan masyarakat terkait Pencatatan Sipil
- c. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
  - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil
  - 2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil

- 3) Sub Kegiatan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil
- 4) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil

### **3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

- a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
  - 1) Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
  - 2) Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
  - 3) Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
- b. Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - 1) Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - 2) Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
  - 4) Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - 5) Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
- d. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - 1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - 2) Sub Kegiatan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan

Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan

- 3) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

#### **4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan**

- a. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
  - 2) Sub Kegiatan Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan lain

#### **5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 5) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- 7) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 9) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
  - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan kesekretariatan dinas.
- b. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyelenggaraan kesekretariatan dinas;	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM pelayanan administrasi kependudukan.	1. Belum adanya rekrutment/penambahan ASN dengan kompetensi sesuai kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan.
2	Belum optimalnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan;	1. Belum optimalnya sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dalam memberikan dukungan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Surakarta.	1. Ketergantungan sistem dan jaringan operasional SIAK secara terpadu dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		2. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah.	2. Terbatasnya kualitas perangkat teknologi informatika dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan.
		3. Belum optimalnya pemanfaatan inovasi pelayanan oleh masyarakat.	3. Belum optimalnya tindak lanjut PKS (Perjanjian Kerjasama) pemanfaatan data kependudukan oleh 34 perangkat.
			4. Belum seluruh masyarakat terjangkau dalam pemberian pemahaman tentang pentingnya dokumen kependudukan dan inovasi pelayanan.

Selain beberapa permasalahan pokok tersebut, perlu juga untuk menyikapi isu penting sebagaimana disampaikan pada Bab 2 terkait pemberlakuan SIAK Terpusat. Perlu disusun rencana dan strategi pelayanan yang dapat menunjang pencapaian target kinerja Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja dan pelayanan di triwulan 1 tahun 2022, antara lain:

1. Meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas sarana dan SDM pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui peningkatan kapasitas SDM Aparatur, penjaminan mutu pelayanan termasuk reviu SOP-SPP dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang kebijakan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Mengembangkan sistem layanan online berbasis android yang adaptif terhadap SIAK Terpusat. Strategi ini akan didukung dengan rencana aksi antara lain:
  - a. Perubahan sistem layanan online dari aplikasi Dukcapil Dalam Genggaman menjadi layanan online melalui WA Ticket yang akan diproses dengan *google sheet*
  - b. Mengedepankan layanan sistem jemput bola sehingga dapat mengurangi aduan atau complain terkait layanan aplikasi online yang tidak aktif sementara waktu
  - c. Pada Rencana Kerja Tahun 2023, memprioritaskan peremajaan sarana prasarana TIK agar semakin adaptif dengan SIAK Terpusat
3. Meningkatkan tingkat akurasi data kependudukan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah untuk mendukung kebijakan Big Data dalam mewujudkan Smart City Kota Surakarta melalui peningkatan pelaporan peristiwa penting dari masyarakat secara aktif dan peningkatan fasilitasi inovasi pelayanan



administrasi kependudukan

4. Meningkatkan penyelenggaraan kesekretariatan dinas melalui optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Secara rinci rencana pendanaan indikatif Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk perubahan rencana kerja tahun 2022 secara rinci tercantum pada Tabel berikut:



**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih
				Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan	Aktivitas	Pagu Aktivitas	Aktivitas	Pagu Aktivitas	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	8	Dok				Belanja makanan dan minuman rapat	3.024.000	Belanja makanan dan minuman rapat tentang Pendataan Penduduk non Permanen	3.024.000	-
										Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	288.575	Belanja fotokopi Keg. Pendataan Penduduk Non Permanen	288.575	-
										Belanja transportasi petugas penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan	5.670.450	Belanja transportasi petugas penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan	5.670.450	-
								1	Lokasi					
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan	Jumlah KTP yang dicetak	51000	Dok	Jumlah KTP yang dicetak	51.000	Dok	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos belanja materai	100.000	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos belanja materai	-	100.000
				Jumlah KK yang dicetak	37000	Dok	Jumlah KK yang dicetak	37.000	Dok	Jamuan Makan Minum (Box Rapat dalam rapat Rutin, lembur)	2.160.000	Jamuan Makan Minum (Box Rapat dalam rapat Rutin, lembur)	5.810.000	3.650.000
				Jumlah KIA yang dicetak	120	Dok	Jumlah KIA yang	120	Dok	Belanja perjalanan dinas dalam negeri	6.750.000	Belanja perjalanan dinas dalam negeri	43.200.000	36.450.000
PROGRAM PENDAFTARAN	Pelayanan Pendaftaran	2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah	Jumlah peserta rapat	300	org	Jumlah peserta rapat	300	org	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.845.000	Belanja hardisk eksternal 1 tera	1.845.000	-
										Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.155.000	Jamuan Makan dan minum kecil rapat dalam rapat rutin lembur, rapat koordinasi tentang Jamuan Makan minum kecil (box) rapat dalam rapat rutin lembur rapat koordinasi tentang penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	7.155.000	-
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran	Jumlah implementasi inovasi pelayanan ( Pelayanan Jemput Bola )	82	kali	Jumlah implementasi inovasi pelayanan (	82	kali	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.450.000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.450.000	- 2.000.000
				Inovasi pelayanan pendaftaran penduduk	1	kegiatan	Inovasi pelayanan pendaftaran	1	kegiatan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.250.000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	11.250.000
										Belanja makanan dan minuman rapat koordinasi dan sosialisasi tentang inovasi pelayanan	20.520.000	Belanja makanan dan minuman rapat koordinasi dan sosialisasi tentang inovasi pelayanan	33.484.000	12.964.000
										Belanja seragam batik untuk Inovasi pelayanan	30.000.000	Belanja seragam batik untuk Inovasi pelayanan	30.000.000	-
										Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan Panitia	2.500.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa acara, dan Panitia	25.000.000	22.500.000
										Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.300.000	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	6.300.000
										Belanja Paket/Pengiriman	70.000.000	Belanja Paket/Pengiriman	40.000.000	- 30.000.000
										Belanja transportasi dan akomodasi Study Komparasi tentang Inovasi Pelayanan	31.500.000	Belanja transportasi dan akomodasi Study Komparasi tentang Inovasi Pelayanan	40.016.000	8.516.000
										Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja transportasi Jemput Bola Pelayanan Inovasi BENING KEKASIH Belanja transportasi Jemput Bola Pelayanan Perekaman KTP Belanja transportasi Jemput Bola Pelayanan KIA	340.680.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja transportasi Jemput Bola Pelayanan Inovasi BENING KEKASIH Belanja transportasi Jemput Bola Pelayanan Perekaman KTP Belanja transportasi Jemput Bola Pelayanan KIA	256.800.000	- 83.880.000

Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih	
				Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan	Aktivitas	Pagu Aktivitas	Aktivitas	Pagu Aktivitas		
											Belanja telepon wireless	2.250.000	Belanja telepon wireless	2.250.000	-
											Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	-	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	24.150.000	24.150.000
											Penggunaan materi sosialisasi	-	Penggunaan materi sosialisasi	-	-
											Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Berorientasi Bidang Kependudukan	50.000.000	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Berorientasi Bidang Kependudukan	-	50.000.000
											Belanja perjalanan dinas dalam kota Uang saku peserta sosialisasi	-	Belanja perjalanan dinas dalam kota Uang saku peserta sosialisasi	65.000.000	65.000.000
											Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak Cetak MMT	-	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak Cetak MMT	300.000	300.000
PROGRAM PENDAFTARAN	Pelayanan Pendaftaran	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan	Jumlah penduduk pindah keluar	9000	Dok	Jumlah penduduk pindah keluar	9.000	Dok	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	382.500	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	382.500	-	
				Jumlah penduduk datang	18500	Dok	Jumlah penduduk datang	18.500	Dok	Belanja makanan dan minuman rapat tentang pindah datang penduduk	4.095.000	Belanja makanan dan minuman rapat tentang pindah datang penduduk	4.095.000	-	
PROGRAM PENDAFTARAN	Pelayanan Pendaftaran	2.12.02.2.01.06	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa	Jumlah laporan peristiwa kependudukan	12	bulan	Jumlah laporan peristiwa	12	bulan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	680.000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	680.000	-	
											Belanja makanan dan minuman rapat untuk kegiatan pelaporan peristiwa kependudukan	3.780.000	Belanja makanan dan minuman rapat untuk kegiatan pelaporan peristiwa kependudukan	3.780.000	-
PROGRAM PENDAFTARAN	Pelayanan Pendaftaran	2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil	Pengadministrasian atas pelaporan peristiwa penting	30	Dok	Pengadministrasian atas pelaporan	30	Dok	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	680.000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	680.000	-	
				Dokumen yang diterbitkan atas pelaporan jiwa cecer	3	Dok	Dokumen yang diterbitkan atas	3	Dok	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyelesaian Laporan Jiwa Cecer	3.780.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penyelesaian Laporan Jiwa Cecer	3.780.000	-	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penataan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan,	Dokumen rencana kerja, monev, dan RTL terkait pendaftaran penduduk	3	Dok	Dokumen rencana kerja, monev, dan RTL terkait	3	Dok	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	4.250.000	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	4.250.000	-	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penataan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan	Jumlah kebutuhan blangko terkait pendaftaran penduduk	11	jenis	Jumlah kebutuhan blangko terkait pendaftaran	11	jenis	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000	-	
											Belanja honorarium pengadaan barang/jasa	1.450.000	Belanja honorarium pengadaan barang/jasa	1.450.000	-
											Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	83.767.500	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	83.767.500	-
											Belanja cetak Form Pendaftaran Penduduk, Kartu ucapan Walikota	-	Belanja cetak Form Pendaftaran Penduduk, Kartu ucapan Walikota	-	-
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta rapat koordinasi terkait penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk	200	org	Jumlah peserta rapat koordinasi terkait penerbitan pelayanan pendaftaran penduduk	200	org	Belanja makanan dan minuman rapat	6.300.000	Belanja makanan dan minuman rapat	6.300.000	-	
											Belanja makanan dan minuman rapat koordinasi terkait pendaftaran pelayanan penduduk (migrasi, KUA, PA, PN, BPN)	-	Belanja makanan dan minuman rapat koordinasi terkait pendaftaran pelayanan penduduk (migrasi, KUA, PA, PN, BPN)	-	-
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa	Pelayanan jemput bola pendaftaran penduduk	96	kali	Pelayanan jemput bola pendaftaran penduduk	96	kali	Belanja makanan dan minuman Rapat	13.500.000	Belanja makanan dan minuman Rapat	13.500.000	-	
											Belanja makanan dan minuman Jemput bola pelayanan Dokumen Adminduk	-	Belanja makanan dan minuman Jemput bola pelayanan Dokumen Adminduk	-	-
											Belanja perjalanan dinas dalam kota	76.500.000	Belanja perjalanan dinas dalam kota	76.500.000	-
											Belanja transportasi jemput bola pelayanan dokumen adminduk	-	Belanja transportasi jemput bola pelayanan dokumen adminduk	-	-
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Fasilitasi pemohon penghapusan NIK ganda dan surat pindah dari luar kota	200	Dok	Fasilitasi pemohon penghapusan NIK ganda dan surat	200	Dok	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	42.500	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	27.500	-	
															15.000
											Belanja makanan dan minuman rapat	135.000	Belanja makanan dan minuman rapat	270.000	135.000
											Belanja makanan dan minuman rapat koordinasi tentang fasilitasi pendaftaran penduduk terkait NIK ganda dan permohonan SKP WNI dari daerah lain	-	Belanja makanan dan minuman rapat koordinasi tentang fasilitasi pendaftaran penduduk terkait NIK ganda dan permohonan SKP WNI dari daerah lain	-	-
											Belanja perjalanan dinas dalam kota	4.320.000	Belanja perjalanan dinas dalam kota	4.200.000	-
											Belanja transportasi petugas jemput bola petugas konfirmasi permohonan pindah dari Kab/Kota lain	-	Belanja transportasi petugas jemput bola petugas konfirmasi permohonan pindah dari Kab/Kota lain	-	120.000

Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih
				Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan	Aktivitas	Pagu Aktivitas	Aktivitas	Pagu Aktivitas	
PROGRAM PENDAFTARAN	Penyelenggaraan Pendaftaran	2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran	Jumlah peserta sosialisasi pendaftaran penduduk	120	org	Jumlah peserta sosialisasi	120	org	Belanja honorarium pengadaan barang dan jasa	1.450.000	Belanja honorarium pengadaan barang dan jasa	1.450.000	-
										Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	24.300.000	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	24.300.000	-
										Belanja Starter kit		Belanja Starter kit		-
										Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	1.657.500	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	1.657.500	-
										MMT dan fotocopy materi		MMT dan fotocopy materi		-
										Belanja makanan dan minuman rapat	16.200.000	Belanja makanan dan minuman rapat	16.200.000	-
										Belanja makanan dan minuman sosialisasi pendaftaran penduduk		Belanja makanan dan minuman sosialisasi pendaftaran penduduk		-
										Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	1.600.000	Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia	1.600.000	-
										Honorarium moderator dan narasumber sosialisasi		Honorarium moderator dan narasumber sosialisasi		-
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah kerjasama yang dilakukan terkait pendaftaran penduduk	1	lembaga	Jumlah kerjasama yang dilakukan terkait pendaftaran penduduk	1	lembaga	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	357.000	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	479.000	122.000
										Belanja Fotocopy		Belanja Fotocopy		-
										Belanja makanan dan minuman rapat	10.530.000	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000	- 3.530.000
										Belanja makanan dan minuman kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan & Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk		Belanja makanan dan minuman kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan & Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk		-
										Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat tulis kantor	2.592.000	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat tulis kantor	-	- 2.592.000
										Belanja souvenir		Belanja souvenir		-
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku	Pembuatan leaflet / brosur terkait pendaftaran penduduk	1000	lembar	Pembuatan leaflet / brosur terkait pendaftaran penduduk	1.000	lembar	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak Kalender	12.750.000	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	13.750.000	1.000.000
										Belanja jasa iklan/reklame, Film dan Pemotretan	15.000.000	Belanja jasa iklan/reklame, Film dan Pemotretan	20.000.000	5.000.000
										Belanja pembuatan video pelayanan		Belanja pembuatan video pelayanan		-
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawab	Laporan data kependudukan	12	bulan	Laporan data kependudukan	12	bulan	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	884.000	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	884.000	-
										Belanja fotocopy		Belanja fotocopy terkait Penyajian data kependudukan		-
										Belanja makanan dan minuman rapat	3.564.000	Belanja makanan dan minuman rapat	3.564.000	-
										Belanja makanan dan minuman Penyajian data kependudukan		Belanja makanan dan minuman Penyajian data kependudukan		-
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.04.01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan,	12	bulan	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan,	12	bulan	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	810.000	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	810.000	-
										Belanja pembelian drum untuk pemusnahan dokumen		Belanja pembelian drum untuk pemusnahan dokumen		-
										Belanja makanan dan minuman rapat	1.890.000	Belanja makanan dan minuman rapat	1.890.000	-
										Belanja makanan dan minuman kegiatan pemusnahan dokumen		Belanja makanan dan minuman kegiatan pemusnahan dokumen		-

Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih
				Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan	Aktivitas	Pagu Aktivitas	Aktivitas	Pagu Aktivitas	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	12	bulan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	12	bulan	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor Belanja starter kit	792.000	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor Belanja starter kit	792.000	-
										Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota	21.614.400	Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota	21.614.400	-
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk	100	org	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk	100	org	Belanja honorarium pengadaan barang/jasa Honorarium Pengadaan Brang/jasa Bimbingan Teknis FO-BO	1.450.000	Belanja honorarium pengadaan barang/jasa Honorarium Pengadaan Brang/jasa Bimbingan Teknis FO-BO	1.450.000	-
										Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat tulis kantor Belanja starter kit Bimbingan teknis FO-BO	3.960.000	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat tulis kantor Belanja starter kit Bimbingan teknis FO-BO	3.960.000	-
										Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak	1.487.500	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak	1.487.500	-
										Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman Bintek FO-BO	33.660.000	Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman Bintek FO-BO	33.660.000	-
										Honorarium narasumber/pembahas, moderator, Pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber/tenaga ahli Bimbingan Teknis FO-BO	10.000.000	Honorarium narasumber/pembahas, moderator, Pembawa acara dan panitia Honorarium narasumber/tenaga ahli Bimbingan Teknis FO-BO	10.000.000	-
										Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota	18.000.000	Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota	18.000.000	-
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan	10000	Dok	Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan	10.000	Dok	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor	31.934.187	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor	19.059.876	- 12.874.311
				Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan	500	Dok	Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan	500	Dok	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8.980.735	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Belanja cetak belanja Penggandaan	81.547.846	72.567.111
				Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	5000	Dok	Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	5.000	Dok	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	104.788.800	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.976.000	- 83.812.800
				Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan	100	Dok	Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan	100	Dok	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Transport Petugas Jemput Bola PNS dan Non PNS Pelayanan Pencatatan Sipil	324.000.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Transport Petugas Jemput Bola PNS dan Non PNS Pelayanan Pencatatan Sipil	305.100.000	- 18.900.000
										Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Study tiru inovasi Pelayanan pencatatan sipil	-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Study tiru inovasi Pelayanan pencatatan sipil	23.195.000	23.195.000
										Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pengadaan barang / jasa	-	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pengadaan Barang / Jasa	1.825.000	1.825.000
										Transport Tim/Petugas Permasalahan Hukum Adminduk	-	Transport Tim/Petugas Permasalahan Hukum Adminduk	1.000.000	1.000.000
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Implementasi Inovasi Pelayanan	12	bulan	Implementasi Inovasi Pelayanan	12	bulan	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Pakaian Dinas	1.450.000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Pakaian Dinas	1.450.000	-
										Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor Terkait Pencatatan Sipil	15.178.500	Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor Terkait Pencatatan Sipil	15.178.500	-
										Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak Penggandaan Terkait Pencatatan Sipil	4.680.950	Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak Penggandaan Terkait Pencatatan Sipil	3.901.650	- 779.300
										Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jemput Bola terkait Pencatatan Sipi	52.531.200	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Jemput Bola terkait Pencatatan Sipi	10.455.500	- 42.075.700
										Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)Terkait Pencatatan Sipil	73.950.000	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)Terkait Pencatatan Sipil	74.000.000	50.000
										Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Transport Jemput Bola PNS Non PNS Terkait Pencatatan Sipil	155.520.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Transport Jemput Bola PNS Non PNS Terkait Pencatatan Sipil	198.375.000	42.855.000
										belanja perjalanan dinas dalam kota belanja transport jemput bola penuntasan target daerah/nasional akta seumur hidup	74.000.000	belanja perjalanan dinas dalam kota belanja transport jemput bola penuntasan target daerah/nasional akta seumur hidup	73.950.000	- 50.000
										belanja perjalanan dinas dalam kota belanja transport jemput bola penuntasan target daerah/nasional akta seumur hidup ( SILPA DAK )	-	belanja perjalanan dinas dalam kota belanja transport jemput bola penuntasan target daerah/nasional akta seumur hidup ( SILPA DAK )	75.000.000	75.000.000
										Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	99.450.000	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	-	- 99.450.000

Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih
				Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan	Aktivitas	Pagu Aktivitas	Aktivitas	Pagu Aktivitas	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,	Dokumen rencana kerja, monev dan RTL penyelenggaraan adminduk terkait pencatatan sipil	3	Dok	Dokumen rencana kerja, monev dan RTL penyelenggaraan adminduk terkait pencatatan sipil	3	Dok	Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan kantor-Bahan Cetak Penggandaan Materi Terkait Pencatatan Sipil	204.000	Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan kantor-Bahan Cetak Penggandaan Materi Terkait Pencatatan Sipil	204.000	-
										Belanja Makanan dan Minuman Rapat Terkait Pencatatan Sipil	684.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Terkait Pencatatan Sipil	684.000	-
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jenis formulir terkait pencatatan sipil	12	jenis	Jenis formulir terkait pencatatan sipil	12	jenis	Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Cetak Formulir dan Foto Copy Terkait Pencatatan Sipil	8.500.000	Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Cetak Formulir dan Foto Copy Terkait Pencatatan Sipil	8.500.000	-
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban	Jumlah peserta rapat koordinasi yang dilakukan dalam rangka penerbitan pelkayanan pencatatan sipil	200	org	Jumlah peserta rapat koordinasi yang dilakukan dalam rangka penerbitan pelkayanan pencatatan sipil	200	org	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Terkait Pencatatan Sipil	6.300.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Terkait Pencatatan Sipil	6.300.000	-
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa	Pelayanan jemput bola terkait pencatatan sipil	96	kali	Pelayanan jemput bola terkait pencatatan sipil	96	kali	Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor Bahan Cetak Foto Copy Terkait Pencatatan Sipil	190.400	Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor Bahan Cetak Foto Copy Terkait Pencatatan Sipil	262.800	72.400
										Belanja Makanan Minum Rapat Terkait Pencatatan Sipil	1.778.400	Belanja Makanan Minum Rapat Terkait Pencatatan Sipil	1.976.000	197.600
										Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Transport Jemput Bola Terkait Pencatatan Sipil	7.020.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Transport Jemput Bola Terkait Pencatatan Sipil	6.750.000	- 270.000
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Pendampingan pelayanan pencatatan sipil untuk penduduk rentan	20	Dok	Pendampingan pelayanan pencatatan sipil untuk penduduk rentan	20	Dok	Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Foto Copy Terkait Pencatatan Sipil	212.500	Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Foto Copy Terkait Pencatatan Sipil	212.500	-
										Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Transport PNS Non PNS Terkait Pencatatan Sipil	8.775.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Transport PNS Non PNS Terkait Pencatatan Sipil	8.775.000	-
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.07	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan	Pemanfaatan data akta kelahiran dan akta kematian oleh instansi	1	lembaga	Pemanfaatan data akta kelahiran dan akta kematian oleh instansi	1	lembaga	Belanja Alat /Bahan utk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor Terkait Pencatatan Sipil	900.000	Belanja Alat /Bahan utk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor Terkait Pencatatan Sipil	900.000	-
										Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Fotocopy Terkait Pencatatan Sipil	170.000	Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Fotocopy Terkait Pencatatan Sipil	170.000	-
										Belanja Makanan dan Minuman Rapat Terkait Pencatatan Sipil	3.420.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Terkait Pencatatan Sipil	3.420.000	-
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peserta sosialisasi terkait pencatatan sipil	100	org	Jumlah peserta sosialisasi terkait pencatatan sipil	100	org	Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Terkait Pencatatan Sipil	900.000	Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Terkait Pencatatan Sipil	1.530.000	630.000
										Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Foto Copy Terkait Pencatatan Sipil	382.500	Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Foto Copy Terkait Pencatatan Sipil	427.500	45.000
										Belanja Makanan dan Minuman rapat Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	1.620.000	Belanja Makanan dan Minuman rapat Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	1.620.000	-
										Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Transport Narasumber Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	675.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Transport Narasumber Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	-	675.000

Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih
				Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan	Aktivitas	Pagu Aktivitas	Aktivitas	Pagu Aktivitas	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.09	Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Jumlah kerjasama yang dilakukan terkait pencatatan sipil	1	lembaga	Jumlah kerjasama yang dilakukan terkait pencatatan sipil	1	lembaga	Belanja Alat/Bahan Kantor utk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Peserta Rakor Terkait Pencatatan Sipil	900.000	Belanja Alat/Bahan Kantor utk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Peserta Rakor Terkait Pencatatan Sipil	900.000	-
										Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Foto Copy Terkait Pencatatan Sipil	170.000	Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Foto Copy Terkait Pencatatan Sipil	170.000	-
										Belanja Makanan dan Minuman Rapat Terkait Pencatatan Sipil	3.420.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Terkait Pencatatan Sipil	3.420.000	-
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.10	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Masyarakat	Pembuatan leaflet / brosur terkait pencatatan sipil	3000	lembar	Pembuatan leaflet / brosur terkait pencatatan sipil	3.000	lembar	Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak ,Cetak Brosur/Leaflet Terkait Pencatatan Sipil	7.650.000	Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak ,Cetak Brosur/Leaflet Terkait Pencatatan Sipil	7.650.000	-
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.03.01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen	Pengadministrasian blangko dokumen pelayanan pencatatan sipil	12	bulan	Pengadministrasian blangko dokumen pelayanan pencatatan sipil	12	bulan	Belanja Alat/bahan utk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Jilid Dokumen Terkait Pencatatan Sipil	2.550.000	Belanja Alat/bahan utk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Jilid Dokumen Terkait Pencatatan Sipil	2.550.000	-
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peserta rapat pembinaan terkait pelayanan pencatatan sipil	100	org	Jumlah peserta rapat pembinaan terkait pelayanan	100	org	Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor ,Seminar KitTerkait Pencatatan Sipil	9.000.000	Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor ,Seminar Kit Terkait Pencatatan Sipil	14.375.000	5.375.000
										Belanja Makanan dan Minuman Rapat ,Rakor Mitra Kerja Terkait Pencatatan Sipil	13.500.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat ,Rakor Mitra Kerja Terkait Pencatatan Sipil	10.350.000	- 3.150.000
										Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota,Transport Peserta Mitra Kerja	9.000.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota,Transport Peserta Mitra Kerja	5.750.000	- 3.250.000
										Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak foto copy materi sosialisasi pencatatan sipil	-	Belanja alat / bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak foto copy materi sosialisasi pencatatan sipil	1.025.000	1.025.000
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	2.12.03.2.03.03	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang	Jumlah peserta rapat terkait kebijakan perkawinan non Muslim	30	org	Jumlah peserta rapat terkait kebijakan	30	org	Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Terkait Pencatatan Sipil	2.700.000	Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Terkait Pencatatan Sipil	2.700.000	-
										Belanja Makanan dan Minuman Rapat Terkait Pencatatan Sipil	4.050.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Terkait Pencatatan Sipil	4.050.000	-
										Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ,Transport Peserta Rakor	2.700.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ,Transport Peserta Rakor	2.700.000	-
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	2.12.03.2.03.04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah peserta bintek peningkatan SDM bidang pencatatan sipil	100	org	Jumlah peserta bintek peningkatan SDM bidang	100	org	Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Bimtek Terkait Pencatatan Sipil	5.062.500	Belanja Alat /Bahan utk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Bimtek Terkait Pencatatan Sipil	8.250.000	3.187.500
										Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor - bahan Cetak Foto Copy Terkait Pencatatan Sipil	956.250	Belanja Alat/Bahan utk Kegiatan Kantor - bahan Cetak Foto Copy Terkait Pencatatan Sipil	893.750	- 62.500
										Belanja Makanan dan Minuman Peserta Bimtek Terkait Pencatatan Sipil	10.125.000	Belanja Makanan dan Minuman Peserta Bimtek Terkait Pencatatan Sipil	8.250.000	- 1.875.000
										Honorarium Narasumber atau Pembahas ,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Bimtek Terkait Pencatatan Sipil	4.500.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas ,Moderator,Pembawa Acara dan Panitia Bimtek Terkait Pencatatan Sipil	4.500.000	-
										Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota Transport Peserta Bimtek Terkait Pencatatan Sipil	6.750.000	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota Transport Peserta Bimtek Terkait Pencatatan Sipil	5.500.000	- 1.250.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan	2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah pengolahan dan penyajian data kependudukan (DKB)	2	kali	Jumlah pengolahan dan penyajian data kependudukan (DKB)	2	kali	Belanja penggandaan Fotocopy Folio	1.445.000	Belanja penggandaan Fotocopy Folio Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data	1.445.000	-
										Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.700.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data	20.700.000	-
										Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	22.000.000	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data	30.120.000	8.120.000
										Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.926.913	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.926.912	- 1
										Pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi sistem informasi	57.963.050	Pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi sistem informasi	-	- 57.963.050
										Transportasi	10.462.500	Belanja transport PNS dan Non PNS Petugas Jemput Bola Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data	10.462.500	-
										Belanja Modal Peralatan/Mesin	25.809.400	Belanja Modal Peralatan/Mesin Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data	-	- 25.809.400



Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Sellish
				Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan	Aktivitas	Pagu Aktivitas	Aktivitas	Pagu Aktivitas	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan	2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah perjanjian kerjasama pemanfaatan data	15	lembaga	Jumlah perjanjian kerjasama pemanfaatan data	15	lembaga	Belanja Penggandaan Pendokumentasian Dokumen Kependudukan	29.767.425	Belanja Penggandaan Pendokumentasian Dokumen Kependudukan	29.767.425	-
										Belanja Bahan Pemeliharaan dokumen	753.750	Belanja Bahan Pemeliharaan dokumen-Pengharum Ruang Arsip	753.750	-
										Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kerjasama Akses Data	3.727.800	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kerjasama Akses Data	3.727.800	-
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database	2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah data yang telah diinventarisasi untuk kepentingan pembangunan daerah	1	kegiatan	Jumlah data yang telah diinventarisasi untuk kepentingan pembangunan	1	kegiatan	Belanja Alat Tulis Kantor	4.455.000	Belanja Alat Tulis Kantor	-	4.455.000
										Belanja Cetak/Penggandaan	1.946.500	Belanja Cetak/Penggandaan Kegiatan Inventarisasi Data	1.946.500	-
										Makan minum rapat rencana kerja/kegiatan dan monitoring	5.859.000	Belanja Makanan dan minuman rapat rencana kerja/kegiatan dan monitoring	8.314.000	2.455.000
										Transportasi perjalanan ke kel/RS/Skul/kec	23.625.000	Belanja Transport perjalanan ke kel/RS/Skul/kec Fasyankes	23.625.000	-
										Belanja Benda Pos Kegiatan Inventarisasi Data	-	Belanja Benda Pos Kegiatan Inventarisasi Data	2.000.000	2.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi	2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan,	Jumlah dokumen rencana kerja , RTL dan movev pengelolaan kependudukan	3	Dok	Jumlah dokumen rencana kerja , RTL dan movev pengelolaan	3	Dok	Belanja makan minum rapatrutin, lembur	10.215.000	Belanja makanan dan minuman kegiatan terkait Pengelolaan Informasi Adminduk	10.215.000	-
										Belanja Perjalanan dinas	4.590.000	Belanja Transport Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan/transport keliling	4.590.000	-
										Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.517.500	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	11.517.500
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah	5	lembaga	Jumlah koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah	5	lembaga	Koordinasi antar lembaga pemerintahan	18.000.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.000.000	-
												Belanja Penggandaan kegiatan pemerintahan tentang database/SIAK ke Propinsi/Jakarta/Kab/Kota		
PROGRAM PENGELOLAAN	Penyelenggaraan Pengelolaan	2.12.04.2.03.03	Fasilitas terkait Pengelolaan	Jumlah sarana dan prasarana yang diremajakan	5	unit	Jumlah sarana dan prasarana yang	5	unit	Belanja Komputer dan alat rekam KTP-el	127.500.000	Belanja Komputer dan alat rekam KTP-el	-	127.500.000
										Pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi/sistem informasi	-	Belanja Pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi/sistem informasi	41.843.050	41.843.050
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Komunikasi, Informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	14	lembaga	Komunikasi, Informasi dan edukasi kepada pemangku	14	lembaga	Belanja Penggandaan	1.810.500	Belanja Penggandaan kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data	1.810.500	-
										Makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dengan stakeholder	5.724.000	Belanja Makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dengan stakeholder	5.724.000	-
										Belanja Pulsa Internet	1.260.000	Belanja Pulsa Internet kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data	1.260.000	-
										Transportasi monitoring dan evaluasi ke stakeholder Pengguna Pemanfaatan data kependudukan	18.225.000	Belanja Transport monitoring dan evaluasi ke stakeholder Pengguna Pemanfaatan data kependudukan	18.225.000	-
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah peserta sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	120	Orang/glat	Jumlah peserta sosialisasi terkait pengelolaan informasi	120	Orang/glat	Belanja ATK Kerjasama Pemanfaatan Data	1.004.500	Belanja ATK Kerjasama Pemanfaatan Data	1.004.500	-
										Belanja ATK Sosialisasi dan Evaluasi Inovasi	1.004.500	Belanja ATK Sosialisasi dan Evaluasi Inovasi	1.004.500	-
										Belanja ATK Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan pada APBD Kota Surakarta Tahun 2022	500.000	Belanja ATK Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan pada APBD Kota Surakarta Tahun 2022	500.000	-
										Belanja Cetak dan Penggandaan	70.018.035	Belanja Cetak dan Penggandaan Kegiatan Sosialisasi	70.018.035	-
										Belanja Makanan dan minuman Rapat Makan minum peserta Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan pada APBD Kota Surakarta Tahun 2022	14.250.000	Belanja Makanan dan minuman peserta Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan pada APBD Kota Surakarta Tahun 2022	14.250.000	-
										Belanja Makanan dan minuman Rapat Makan minum rapat pengelola aduan/pemanfaatan data/mitra kerja KIA	5.643.000	Belanja Makanan dan minuman Rapat pengelola aduan/pemanfaatan data/mitra kerja KIA	5.643.000	-
										Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Akomodasi makan minum peserta Kerjasama Pemanfaatan Data	4.800.000	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Akomodasi makan minum peserta Kerjasama Pemanfaatan Data	4.800.000	-
										Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Akomodasi makan minum peserta Sosialisasi dan Evaluasi Inovasi	9.600.000	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Akomodasi makan minum peserta Sosialisasi dan Evaluasi Inovasi	9.600.000	-
										Honorarium Moderator Kerjasama Pemanfaatan Data	1.400.000	Honorarium Moderator Kerjasama Pemanfaatan Data	1.400.000	-
										Honorarium Moderator Sosialisasi dan Evaluasi Inovasi	4.200.000	Honorarium Moderator Sosialisasi dan Evaluasi Inovasi	4.200.000	-
										Honorarium Narasumber Kerjasama Pemanfaatan Data	4.800.000	Honorarium Narasumber Kerjasama Pemanfaatan Data	4.800.000	-
										Honorarium Narasumber Sosialisasi dan Evaluasi Inovasi	14.400.000	Honorarium Narasumber Sosialisasi dan Evaluasi Inovasi	14.400.000	-

Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih
				Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan	Aktivitas	Pagu Aktivitas	Aktivitas	Pagu Aktivitas	
										Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan pada APBD Kota Surakarta Tahun 2022	25.000.000	Honorarium Narasumber/Moderator/Pembawa Acara Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan pada APBD Kota Surakarta Tahun 2022	25.000.000	-
										Siaran Media massa Kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan Belanja Jasa Media (Radio) Sosialisasi Administrasi Kependudukan	20.000.000	Belanja Jasa Media (Radio) dan Pembuatan Video Sosialisasi Administrasi Kependudukan	20.000.000	-
										Belanja Pulsa Internet	1.260.000	Belanja Pulsa Internet kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.260.000	-
										Transport Kerjasama Pemanfaatan Data	3.000.000	Belanja transport Kerjasama Pemanfaatan Data	3.000.000	-
										Transport Pembuatan Pendokumentasian Kompetisi Inovasi dan Supervisi Akses Data	3.960.000	Belanja Transport Pembuatan Pendokumentasian Kompetisi Inovasi dan Supervisi Akses Data	3.960.000	-
										Transport Peserta Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan pada APBD Kota Surakarta Tahun 2022	18.750.000	Belanja Transport Peserta Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan pada APBD Kota Surakarta Tahun 2022	18.750.000	-
										Transport Sosialisasi dan Evaluasi Inovasi	6.000.000	Belanja Transport Peserta Sosialisasi dan Evaluasi Inovasi	6.000.000	-
										Transport Tim Jemput Bola Sosialisasi Kependudukan di Kecamatan/Kelurahan/Mitra Kerja KIA/Pengguna Hak Akses Data	18.225.000	Belanja Transport Tim Jemput Bola Sosialisasi Kependudukan di Kecamatan/Kelurahan/Mitra Kerja KIA/Pengguna Hak Akses Data	18.225.000	-
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi	2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat	Jumlah database kependudukan yang terupdate	1	kegiatan	Jumlah database kependudukan yang terupdate	1	kegiatan	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	2.000.000	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	-	2.000.000
										Belanja Cetak Buku Profil	21.250.000	Belanja Cetak Buku Profil	21.250.000	-
										Belanja Fotocopy	1.020.000	Belanja Fotocopy	1.020.000	-
										Belanja makan minum rapat	11.520.000	Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan Penyajian Data Kependudukan	11.520.000	-
										Belanja Transportasi	8.100.000	Belanja transport PNS/Non PNS Check Peralatan TI dan data ke RS/Sekolah/KUA/Mobilkeliling	8.100.000	-
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan	2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan	Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dok	Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dok	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.750.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6.750.000	-
										Belanja Komputer/Laptop dan Printer	19.125.000	Belanja Komputer/Laptop dan Printer terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	19.125.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.04.02	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan	Telaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	12	bln	Telaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama dalam	12	bln	Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rapat Koordinasi Antar Lembaga	30.000.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Uang Saku Peserta Workshop antar Lembaga	4.500.000	- 25.500.000
												Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli, Moderator, MC Workshop antar Lembaga	4.600.000	4.600.000
												Belanja Makanan dan Minuman Rapat Full Board Meeting Workshop antar Lembaga	15.300.000	15.300.000
												Belanja Staterkit Workshop antar Lembaga	4.950.000	4.950.000
												Belanja Pengandaan Kegiatan Workshop antar Lembaga	650.000	650.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendencygunaan	Tercukupinya Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendencygunaan Data Kependudukan	100	org	Tercukupinya Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan	100	org	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	67.500.000	Belanja transportasi dan Akomodasi Peserta BinteK ADB dan Operator SIAK	8.000.000	- 59.500.000
												Belanja transportasi dan Akomodasi Narasumber BinteK ADB dan Operator SIAK	1.790.000	1.790.000
												Belanja transportasi dan Akomodasi Survey	2.400.000	2.400.000
												Belanja Uang Transport BinteK ADB dan Operator SIAK	8.500.000	8.500.000
												Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	4.000.000	4.000.000
												Belanja Makanan dan Minuman Rapat Fullboard Meeting BinteK ADB dan Operator SIAK	34.000.000	34.000.000
												Belanja Pengandaan dan Cetak	800.000	800.000
												Belanja Staterkit BinteK ADB dan Operator SIAK	8.010.000	8.010.000
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL	Penyusunan Profil Kependudukan	2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan	Jumlah buku profil yang tersusun	100	Dok	Jumlah buku profil yang tersusun	100	Dok	honor tim pengadaan barang/jasa	2.000.000	honor tim pengadaan barang/jasa	-	2.000.000
										belanja jasa transportasi	7.200.000	Belanja Transport Jemolan Pelayanan TI Kelurahan/Kecamatan	9.200.000	2.000.000



Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan	Pagu Aktivitas	Setelah Perubahan		Selisih
				Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan			Aktivitas	Pagu Aktivitas	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP tersusun	1	Dok	Jumlah dokumen LKJIP tersusun	1	Dok	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak cetak buku LKJIP,LKPJ,LPPD Belanja Pengandaan Fotocopy Folio Pembulatan	1.742.500	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak cetak buku LKJIP,LKPJ,LPPD Belanja Pengandaan Fotocopy Folio Pembulatan	1.742.500	-
				Jumlah dokumen LKPJ	1	Dok	Jumlah dokumen LKPJ	1	Dok	Belanja Makanan dan minuman Rapat makan minum rapat penyusunan LKJIP,LKPJ dan LPPD jamuan makan minum (box), jamuan makan minum (snack box) rapat dalam rapat rutin lembur	7.155.000	Belanja Makanan dan minuman Rapat makan minum rapat penyusunan LKJIP,LKPJ dan LPPD jamuan makan minum (box), jamuan makan minum (snack box) rapat dalam rapat rutin lembur	7.155.000	-
				Jumlah dokumen LPPD	1	Dok	Jumlah dokumen	1	Dok					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SKM	1	Dok	Jumlah dokumen SKM	1	Dok	Belanja honorarium pengadaan barang/jasa Honor Tim Pengadaan Jasa Konsultasi Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi s/d 100 juta PPK Pengadaan Jasa Konsultasi s/d 100 juta	2.300.000	Belanja honorarium pengadaan barang/jasa Honor Tim Pengadaan Jasa Konsultasi Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi s/d 100 juta PPK Pengadaan Jasa Konsultasi s/d 100 juta	2.300.000	-
				Jumlah dokumen SPP	1	Dok	Jumlah dokumen SPP	-	Dok	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Cetak dan pengadaan materi cetak buku SOP dan SPP fotocopy folio	1.448.400	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Cetak dan pengadaan materi cetak buku SOP dan SPP fotocopy folio	1.448.400	-
				Jumlah dokumen Surveillance ISO 19001: 2015	1	Dok	Jumlah dokumen Surveillance ISO 19001: 2015	1	Dok	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Rapat Penyusunan SOP, SPP,SKM Surveillance ISO dan Bintek Capacity Building (Tindak Lanjut SKM) Jamuan makan minum (box) rapat dalam rapat rutin,lembur jamuan makan minum kecil (snack box) makan minum rapat bintek capacity building (Tindak Lanjut SKM) 1 kali rehat kopi 1 kali makan	26.429.400	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makan Minum Rappat Penyusunan SOP, SPP,SKM Surveillance ISO dan Bintek Capacity Building (Tindak Lanjut SKM) Jamuan makan minum (box) rapat dalam rapat rutin,lembur jamuan makan minum kecil (snack box) makan minum rapat bintek capacity building (Tindak Lanjut SKM) 1 kali rehat kopi 1 kali makan	26.429.400	-
							Terlaksananya evaluasi kinerja dan inovasi pelayanan bersama stakeholder	1	kegiatan	Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator,pembawa acara dan panitia honorarium narasumber bintek capacity building (bintek SKM) Honorarium Narasumber SOP dan SPP Narasumber Penyusunan SOP dan SP	5.500.000	Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator,pembawa acara dan panitia honorarium narasumber bintek capacity building (bintek SKM) Honorarium Narasumber SOP dan SPP Narasumber Penyusunan SOP dan SP	5.500.000	-
							Terlaksananya Forum Konsultasi Publik	1	kegiatan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Paket Meeting Dalam Kota Transportasi dan Akomodasi bintek Capacity Building (tindak lanjut SKM)	4.350.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Paket Meeting Dalam Kota Transportasi dan Akomodasi bintek Capacity Building (tindak lanjut SKM)	4.350.000	-
							Terlaksananya DKT Pembahasan draft Perwali atas pelaksanaan Perda 1 Tahun 2015 tentang Administrasi	1	kegiatan	Belanja Jasa Konsultansi berorientasi Layanan-Jasa Khusus Jasa Konsultansi Pendampingan Surveillance ISO Jasa Konsultansi SKM Jasa Sertifikasi Surveillance ISO	81.780.000	Belanja Jasa Konsultansi berorientasi Layanan-Jasa Khusus Jasa Konsultansi Pendampingan Surveillance ISO Jasa Konsultansi SKM Jasa Sertifikasi Surveillance ISO	81.780.000	-
										Belanja honorarium narasumber/pembahas, moderator, pembawa acara,panitia Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja dan Inovasi Pelayanan (SILPA DAK)	-	Belanja honorarium narasumber/pembahas, moderator, pembawa acara,panitia Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja dan Inovasi Pelayanan (SILPA DAK)	11.600.000	11.600.000
										Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Transportasi SKM TW. III dan TW. IV	-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Transportasi SKM TW. III dan TW. IV	8.000.000	8.000.000
										Belanja honorarium/pembahas, moderator, pembawa acara,panitia Kegiatan Forum Konsultasi Publik (SILPA DAK)	-	Belanja honorarium/pembahas, moderator, pembawa acara,panitia Kegiatan Forum Konsultasi Publik (SILPA DAK)	8.200.000	8.200.000
										Belanja Perjalanan Dinas Studi Banding Luar Kota (dalam rangka Penyusunan Juknis atas Perda Surakarta 1 Tahun 2015)	-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota Studi Banding Luar Kota (dalam rangka Penyusunan Juknis atas Perda Surakarta 1 Tahun 2015)	16.952.000	16.952.000

Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih	
				Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan	Aktivitas	Pagu Aktivitas	Aktivitas	Pagu Aktivitas		
											Belanja honorarium narasumber/pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia DKT Pembahasan draft Perwali atas pelaksanaan Perda 1/2015 tentang Administrasi Kependudukan	-	Belanja honorarium narasumber/pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia DKT Pembahasan draft Perwali atas pelaksanaan Perda 1/2015 tentang Administrasi Kependudukan	3.000.000	3.000.000
											Belanja makan minum rapat Jamuan makan minum besar prasmanan Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja dan Inovasi Pelayanan (SILPA DAK)	-	Belanja makan minum rapat Jamuan makan minum besar prasmanan Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja dan Inovasi Pelayanan (SILPA DAK)	10.795.000	10.795.000
											Belanja transportasi dan akomodasi Narasumber dari Kementerian untuk Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja dan Inovasi Pelayanan (SILPA DAK)	-	Belanja transportasi dan akomodasi Narasumber dari Kementerian untuk Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja dan Inovasi Pelayanan (SILPA DAK)	4.500.000	4.500.000
											Belanja cetak dan penggandaan Cetak Piagam Penghargaan dan Penggandaan Materi Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja dan Inovasi Pelayanan (SILPA DAK)	-	Belanja cetak dan penggandaan Cetak Piagam Penghargaan dan Penggandaan Materi Kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja dan Inovasi Pelayanan (SILPA DAK)	1.412.855	1.412.855
											Belanja makan minum rapat Jamuan makan minum besar prasmanan DKT Pembahasan draft Perwali atas pelaksanaan Perda 1/2015 tentang Administrasi Kependudukan	-	Belanja makan minum rapat Jamuan makan minum besar prasmanan DKT Pembahasan draft Perwali atas pelaksanaan Perda 1/2015 tentang Administrasi Kependudukan	5.525.000	5.525.000
											Belanja fotocopy dan Penggandaan Belanja fotocopy penggandaan materi DKT Pembahasan draft Perwali atas pelaksanaan Perda 1/2015 tentang Administrasi Kependudukan	-	Belanja fotocopy dan Penggandaan Belanja fotocopy penggandaan materi DKT Pembahasan draft Perwali atas pelaksanaan Perda 1/2015 tentang Administrasi Kependudukan	623.000	623.000
											Belanja makan minum rapat Jamuan makan minum besar prasmanan Kegiatan Forum Konsultasi Publik (SILPA DAK)	-	Belanja makan minum rapat Jamuan makan minum besar prasmanan Kegiatan Forum Konsultasi Publik (SILPA DAK)	8.500.000	8.500.000
											Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota Transportasi dan akomodasi Kegiatan Forum Konsultasi Publik (SILPA DAK)	-	Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota Transportasi dan akomodasi Kegiatan Forum Konsultasi Publik (SILPA DAK)	5.000.000	5.000.000
											Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak belanja Pengandaan fotocopy folio Kegiatan Forum Konsultasi Publik (SILPA DAK)	-	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak belanja Pengandaan fotocopy folio Kegiatan Forum Konsultasi Publik (SILPA DAK)	645.000	645.000
											Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	-	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	3.560.000	3.560.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	14	bulan	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	14	bulan	1.871.492.060	Belanja Gaji Pokok PNS Penyediaan Gaji, Tunjangan, TPP, Insentif & Kekurangan untuk ASN/PPPK Gaji Pokok PNS/ KDH & Wakil KDH/ Uang Representasi DPRD	-	Belanja Gaji Pokok PNS Penyediaan Gaji, Tunjangan, TPP, Insentif & Kekurangan untuk ASN/PPPK Gaji Pokok PNS/ KDH & Wakil KDH/ Uang Representasi DPRD	1.871.492.060	-
										171.522.471	Belanja Tunjangan Keluarga PNS Penyediaan Gaji, Tunjangan, TPP, Insentif & Kekurangan untuk ASN/PPPK Tunjangan Keluarga	-	Belanja Tunjangan Keluarga PNS Penyediaan Gaji, Tunjangan, TPP, Insentif & Kekurangan untuk ASN/PPPK Tunjangan Keluarga	171.522.471	-
										201.623.500	Belanja Tunjangan Jabatan PNS Penyediaan Gaji, Tunjangan, TPP, Insentif & Kekurangan untuk ASN / PPPK Tunjangan Jabatan	-	Belanja Tunjangan Jabatan PNS Penyediaan Gaji, Tunjangan, TPP, Insentif & Kekurangan untuk ASN / PPPK Tunjangan Jabatan	201.623.500	-

Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih
				Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan	Aktivitas	Pagu Aktivitas	Aktivitas	Pagu Aktivitas	
										Belanja Tunjangan Fungsional PNS Tunjangan, TPP, Insentif & Kekurangan untuk ASN / PPPK Tunjangan Fungsional	11.388.600	Belanja Tunjangan Fungsional PNS Tunjangan, TPP, Insentif & Kekurangan untuk ASN / PPPK Tunjangan Fungsional	11.388.600	-
										Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Tunjangan, TPP, Insentif & Kekurangan untuk ASN / PPPK Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum	36.563.600	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Tunjangan, TPP, Insentif & Kekurangan untuk ASN / PPPK Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum	36.563.600	-
										Belanja Tunjangan Beras PNS Tunjangan Beras	97.822.039	Belanja Tunjangan Beras PNS Tunjangan Beras	97.822.039	-
										Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus PNS Tunjangan PPh/Khusus	10.899.816	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus PNS Tunjangan PPh/Khusus	10.899.816	-
										Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembulatan Gaji	20.415	Belanja Pembulatan Gaji PNS Pembulatan Gaji	20.415	-
										Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kesehatan PNS Penyediaan Gaji, Tunjangan, TPP, Insentif & kekurangan untuk ASN/PPPK Iuran Jaminan Kesehatan	164.894.924	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kesehatan PNS Penyediaan Gaji, Tunjangan, TPP, Insentif & kekurangan untuk ASN/PPPK Iuran Jaminan Kesehatan	164.894.924	-
										Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	15.412.861	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	15.412.861	-
										Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kriteria Tanggung jawab Pekerjaan (13 bln dan THR) + Bulan Desember 2021	2.387.597.025	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kriteria Tanggung jawab Pekerjaan (13 bln dan THR) + Bulan Desember 2021	2.387.597.025	-
										Belanja Honorarium penanggungjawaban Pengelola Keuangan Honorarium Pengelola Keuangan	59.400.000	Belanja Honorarium penanggungjawaban Pengelola Keuangan Honorarium Pengelola Keuangan	59.400.000	-
										Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan Honorarium Pengelola BMD	7.800.000	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan Honorarium Pengelola BMD	7.800.000	-
										Belanja Honorarium Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	-	Belanja Honorarium Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	8.700.000	8.700.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen CALK	1	Dok	Jumlah Dokumen CALK	1	Dok	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak Pelaporan Keuangan Fotocopy Folio Penjilidan Dokumen	2.754.765	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak Pelaporan Keuangan Fotocopy Folio Penjilidan Dokumen	2.754.765	-
				Jumlah Dokumen LRA	1	Dok	Jumlah Dokumen LRA	1	Dok	Belanja Makan Minum rapat keuangan jamuan makan minum (box) Jamuan makan minum kecil (snack box)	2.483.190	Belanja Makan Minum rapat keuangan jamuan makan minum (box) Jamuan makan minum kecil (snack box)	2.483.190	-
				Jumlah dokumen neraca	1	Dok	Jumlah dokumen	1	Dok					
				Jumlah dokumen RKA	2	Dok	Jumlah dokumen RKA	2	Dok					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Penyusunan SOP dan Proses Bisnis	1	Dok	Terlaksananya Penyusunan SOP dan Proses Bisnis	1	Dok	Belanja Pegawai Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa Honor Tim Pengadaan Jasa Konsultansi / Penyusun SOP dan Proses Bisnis	1.150.000	Belanja Pegawai Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa Honor Tim Pengadaan Jasa Konsultansi / Penyusun SOP dan Proses Bisnis	1.150.000	-
										Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi berorientasi/ Jasa Khusus Belanja Jasa Penyediaan Jasa Konsultansi Penyusunan SOP dan Proses Bisnis	73.850.000	Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Belanja Jasa Konsultansi berorientasi/ Jasa Khusus Belanja Jasa Penyediaan Jasa Konsultansi Penyusunan SOP dan Proses Bisnis	73.850.000	-

Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Selisih				
				Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	bulan	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	bulan	Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Belanja Alat Listrik dan Elektronik	5.600.000	Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Belanja Alat Listrik dan Elektronik Barang dan Jasa	6.782.999	1.182.999
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor yang disediakan	12	bulan	Jumlah Alat Tulis kantor yang disediakan	12	bulan	Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor penyediaan alat tulis kantor	23.427.723	Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor penyediaan alat tulis kantor	23.165.540	- 262.183
										Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Alat besar Darat belanja modal mesin alat penghancur kertas/paper shredeer	8.500.000	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Alat besar Darat belanja modal mesin alat penghancur kertas/paper shredeer	8.670.000	170.000
										Belanja peralatan dan perlengkapan kantor belanja modal komputer Belanja pengadaan mesin ADM (anjungan adminduk mandiri) Honorarium pengadaan mesin ADM	202.000.000	Belanja peralatan dan perlengkapan kantor belanja modal komputer Belanja pengadaan mesin ADM (anjungan adminduk mandiri) Honorarium pengadaan mesin ADM	202.000.000	-
										Belanja modal peralatan komputer Belanja Printer	4.648.817	Belanja modal peralatan komputer Belanja Printerr	4.741.000	92.183
										Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Belanja Modal Peralatan/Mesin	-	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Belanja Modal Peralatan/Mesin	25.809.400	25.809.400
										Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	11.517.500	11.517.500
										Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Belanja Komputer dan Alat Rekam KTP-el	-	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Belanja Komputer dan Alat Rekam KTP-el	127.500.000	127.500.000
										Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Belanja Komputer / Laptop dan Printer	-	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Belanja Komputer / Laptop dan Printer	19.125.000	19.125.000
										Belanja Modal Peralatan Komputer Unit Lainnya Belanja Modal Pengadaan Laptop / PC Tablet	-	Belanja Modal Peralatan Komputer Unit Lainnya Belanja Modal Pengadaan Laptop / PC Tablet	99.450.000	99.450.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan rumah tangga yang disediakan	12	jenis	Jumlah Jenis Peralatan rumah tangga yang disediakan	12	jenis	Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat/bahan untuk kegiatan Kantor lainnya Belanja peralatan rumah tangga	1.800.000	Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat/bahan untuk kegiatan Kantor lainnya Belanja peralatan rumah tangga	1.800.000	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum rapat yang disediakan	12	bulan	Jumlah makan minum rapat yang	12	bulan	Belanja Barang dan Jasa penyediaan makanan dan minuman rapat	57.450.966	Belanja Barang dan Jasa penyediaan makanan dan minuman rapat	57.450.966	-
										belanja makanan dan minuman jamuan tamu penyediaan makanan dan minuman tamu	5.250.000	belanja makanan dan minuman jamuan tamu penyediaan makanan dan minuman tamu	5.250.000	-
										Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000	15.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan	terpenuhinya jumlah barang cetak dan penggandaan	12	bulan	terpenuhinya jumlah barang cetak dan	12	bulan	Belanja pegawai belanja Honorarium pengadaan Barang/Jasa	7.432.000	Belanja pegawai belanja Honorarium pengadaan Barang/Jasa	7.432.000	-
										Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat/ bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Barang (ATK e purchasing), Pengadaan barang e purchasing, pengisian toner laserjet, penyediaan ATK umum	1.422.239.500	Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat/ bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Barang (ATK e purchasing), Pengadaan barang e purchasing, pengisian toner laserjet, penyediaan ATK umum	1.522.239.500	100.000.000
										Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak Blangko pendaftaran Penduduk blangko pendaftaran penduduk, formulir pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, belanja penggandaan/ fotocopy	167.858.550	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak Blangko pendaftaran Penduduk blangko pendaftaran penduduk, formulir pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	166.658.550	- 1.200.000
										Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat/ bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Barang (ATK e purchasing), Pengadaan barang e purchasing, pengisian toner laserjet, penyediaan ATK umum Pengadaan Blangko KIA (SILPA DAK)	-	Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat/ bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Barang (ATK e purchasing), Pengadaan barang e purchasing, pengisian toner laserjet, penyediaan ATK umum Pengadaan Blangko KIA (SILPA DAK)	27.600.000	27.600.000

Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih
				Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan	Aktivitas	Pagu Aktivitas	Aktivitas	Pagu Aktivitas	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah buku pustaka yang disediakan	1	jenis	Jumlah buku pustaka yang disediakan	1	jenis	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	2.000.000	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	-	2.000.000
										Belanja Modal Pengadaan Buku Bacaan	-	Belanja Modal Pengadaan Buku Bacaan	2.000.000	2.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercukupinya belanja Perjalanan Dinas	12	bulan	Tercukupinya belanja Perjalanan Dinas	12	bulan	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja perjalanan dinas biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi/Luar Provinsi (Rakornas, Konsultasi ke jakarta/ provinsi/bintek ke jakarta/ provinsi serta pengambilan blangko ktp) biaya perjalanan dinas, rapat	140.000.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja perjalanan dinas biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Provinsi/Luar Provinsi (Rakornas, Konsultasi ke jakarta/ provinsi/bintek ke jakarta/ provinsi serta pengambilan blangko ktp) biaya perjalanan dinas, rapat	140.000.000	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang tersedia	1	Unit	Jumlah mebeleur yang tersedia	1	Unit	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Mebel Pengadaan Mebelair	1.500.000	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Mebel Pengadaan Mebelair	1.500.000	-
										Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	-	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.128.000	1.128.000
										Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Rol'Opack tr 12-300w	-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Rol'Opack tr 12-300w	120.200.000	120.200.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercukupinya kebutuhan surat menyurat	12	bulan	Tercukupinya kebutuhan surat menyurat	12	bulan	Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Habis Pakai Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos meterai, peranko dan benda pos lainnya	6.000.000	Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Habis Pakai Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos meterai, peranko dan benda pos lainnya	6.000.000	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Tagihan Telepon	2.900.000	Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Tagihan Telepon	2.900.000	-
										Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah Belanja Surat Kabar/ majalah	3.100.000	Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah Belanja Surat Kabar/ majalah	3.100.000	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	bulan	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	bulan	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan dan Mesin belanja pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Penggantian Suku Cadang peralatan dan perlengkapan kantor, servise komputer, laptop, printer dan peralatan lainnya	11.250.000	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan dan Mesin belanja pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Penggantian Suku Cadang peralatan dan perlengkapan kantor, servise komputer, laptop, printer dan peralatan lainnya	11.250.000	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	%	Belanja Pegawai Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa Honorarium Pengadaan Sewa Tanaman Hias	1.450.000	Belanja Pegawai Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa Honorarium Pengadaan Sewa Tanaman Hias	1.450.000	-
										Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Habis Pakai Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18.751.819	Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Habis Pakai Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18.751.819	-
										Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Administrasi Jasa Tenaga Kontrak dan Upah Tenaga Kontrak dan Upah 13	1.171.170.000	Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Tenaga Administrasi Jasa Tenaga Kontrak dan Upah Tenaga Kontrak dan Upah 13	1.171.170.000	-
										Belanja Jasa tenaga pelayanan umum belanja jasa tenaga pelayanan umum dan upah 13	120.120.000	Belanja jasa tenaga pelayanan umum belanja jasa tenaga pelayanan umum dan upah 13	120.120.000	-
										Belanja Jasa Kebersihan jasa tenaga kontrak dan upah 13	105.248.000	Belanja Jasa Kebersihan jasa tenaga kontrak dan upah 13	105.248.000	-
										belanja jasa tenaga sopir jasa tenaga kontrak dan upah 13	52.910.000	belanja jasa tenaga sopir jasa tenaga kontrak dan upah 13	52.910.000	-
										belanja jasa tenaga informasi dan teknologi jasa tenaga kontrak dan upah 13	92.235.000	belanja jasa tenaga informasi dan teknologi jasa tenaga kontrak dan upah 13	92.235.000	-



Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih
				Indikator	Target	Satuan	Indikator	Target	Satuan	Aktivitas	Pagu Aktivitas	Aktivitas	Pagu Aktivitas	
										Belanja iuran jaminan / asuransi belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN Jasa Tenaga Kontrak	73.889.214	Belanja iuran jaminan / asuransi belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN Jasa Tenaga Kontrak	73.889.214	-
										Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non ASN Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi no ASN	2.714.645	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi non ASN Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi no ASN	2.714.645	-
										Belanja sewa aset tetap lainnya Belanja sewa tanaman Sewa Tanaman	54.000.000	Belanja sewa aset tetap lainnya Belanja sewa tanaman Sewa Tanaman	54.000.000	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	27	Unit	Jumlah Pemeliharaan	27	Unit	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	107.697.600	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	112.765.600	5.068.000
										Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	500.000	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	500.000	-
										Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	71.852.400	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	71.852.400	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	terpeliharanya mebeleur kantor	12	bulan	terpeliharanya mebeleur kantor	12	bulan	Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan dan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya pemeliharaan rutin/berkala mebelair	7.500.000	Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan dan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya pemeliharaan rutin/berkala mebelair	7.500.000	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	12	bulan	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor	12	bulan	Belanja Honorarium Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ jasa Honorarium Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.450.000	Belanja Honorarium Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ jasa Honorarium Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.450.000	-
										Belanja Pemeliharaan gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	61.695.000	Belanja Pemeliharaan gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan bangunan gedung- bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	61.695.000	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	%	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100	%	Belanja Pemeliharaan dan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Pemeliharaan AC	22.500.000	Belanja Pemeliharaan dan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Pemeliharaan AC	22.500.000	-
											12.378.322.519		12.767.714.372	389.391.853

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian Renja Perubahan Disadmindukcapil Tahun 2022 ini kami susun dengan fokus kegiatan pada upaya-upaya pencapaian target administrasi kependudukan dan pencatatan sipil baik di level Nasional maupun Daerah. Besar harapan kami agar seluruh pihak baik Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta sebagai pemanfaat data kependudukan dan pihak *stakeholder* inovasi serta masyarakat Surakarta secara umum mendukung dan bersinergi bersama Disadmindukcapil dalam mewujudkan Kota Surakarta yang tertib administrasi kependudukan.

Akhir kata, dalam penyusunan Renja Perubahan Diadmindukcapil Tahun 2022 ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kritik dan saran konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan rencana kerja di tahun 2023 dan seterusnya. Terimakasih

Surakarta,  
Kepala Dinas Administrasi Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil  
Kota Surakarta

**YUHANES PRAMONO, SH., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP: 196404131989031010